



**RANCANGAN AKHIR RENCANA
KERJA TAHUN 2025
DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA
PEMATANGSIANTAR**

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PEMATANGSIANTAR

JL. WR. SUPRATMAN NO. 4 PEMATANGSIANTAR

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan berkat dan rahmatNya Dokumen Rancangan AKHIR Kerja Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar Tahun dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Rancanagan Akhir rencana kerja Tahu 2025 ini merupakan dokumen akhir dalam penyusunan Tahapan Rencana Kerja Tahun 2025 yang mana Rencana kerja ini menjadi acuan dalam menteapkan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025 sejak januari sampai dengan Desember. Dokumen ini merupakan kewajiban setiap entitas atau organisasi perangkat daerah.

Demikian Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2025 ini diperbuat dan disusun sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada program priotas.

Pematangsiantar,

KEPALA DINAS KOMUNIKASIINFORMATIKA
KOTA PEMATANGSIANTAR



JOHANNES SIHOMBING, S.STP, M.Si
NIP. 19810325 199912 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pematangsiantar yang diawali dengan penyusunan Rancangan Awal Renja OPD, Rancangan Renja Kemudian Rancangan Akhir Renja OPD berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penetapan Program prioritas yang tertuang dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 berorientasi pada isu prioritas pembangunan Kota Pematangsiantar sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika serta mempertimbangkan pagu indikatif yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Pematangsiantar Tahun 2025

1.1 Latar Belakang

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 serta Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan tahun 2025. Kedudukan daerah dalam pelaksanaan otonomi adalah sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan pembangunan, maka arus informasi yang cepat dalam berbagai kegiatan adalah sangat diperlukan. Untuk mendukung hal tersebut perlu diciptakan sinergi yang lebih bersifat partisipatif dengan memanfaatkan peranan teknologi dan informasi dan komunikasi yang dapat mengakses informasi dan ketersediaan databased sekaligus sebagai sarana komunikasi interaktif. Tiga (3) komponen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yakni; pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam rangka perwujudan Good Governance sesuai tuntutan reformasi.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar selaku penanggung jawab teknis penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang komunikasi dan informatika serta persandian dan statistik berkewajiban menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rancangan Akhir Renja) sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pada tahun berkenaan. Rancangan Akhir Rencana Kerja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik

yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Adapun beberapa hal yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar di Tahun 2025 ini, melalui keberadaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar, diantaranya meningkatkan eksistensi dari urusan kewenangan Komunikasi dan Informatika, urusan kewenangan Statistik, serta urusan kewenangan Persandian. Diharapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar dapat menjadi suatu lembaga yang dapat diandalkan dalam penyediaan informasi yang berkualitas, baik untuk kebutuhan internal maupun eksternal melalui optimalisasi pelayanan berbasis multimedia (media cetak, media online dan media elektronik).

Proses penyusunan Rancangan Akhir Renja OPD dimulai dengan persiapan penyusunan Rancangan Akhir Renja OPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisa gambaran pelayanan OPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD sehingga menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar Tahun 2025 adalah :

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika.
14. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah kota Pematangsiantar.
15. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 06 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2017-2022.
16. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Kota Pematangsiantar.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar Tahun 2025 adalah untuk melaksanakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk 1 tahun anggaran yang dimulai dari tanggal 01 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, penetapan program prioritas yang berorientasi pada isu prioritas pembangunan Kota Pematangsiantar sesuai dengan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Tujuan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar adalah :

1. Menyediakan acuan resmi untuk menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD secara terpadu dan terukur.
2. Menjadikan landasan operasional bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar.
3. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
 1.1 Latar Belakang

| | |
|---------|---|
| | 1.2 Landasan Hukum |
| | 1.3 Maksud dan Tujuan |
| | 1.4 Sistematika Penulisan |
| BAB II | HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU |
| | 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah. |
| | 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah |
| | 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi perangkat daerah |
| | 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD |
| | 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat |
| BAB III | TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH |
| | 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional |
| | 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah |
| | 3.3 Program dan Kegiatan |
| BAB IV | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH |
| BAB V | PENUTUP |

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capain Renstra Tahun Lalu

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

1. Penetapan Indikator Kinerja

Merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), Keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan Indikator Kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

2. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

a. Realisasi Proram/Kegiatan yang tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil Keluaran yang direncanakan.

Pada Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 12.085.964.555.- yang terdiri dari Belanja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp. 2.239.141.524- Belanja Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp. 954.314.335.- Belanja

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 266.624.652.-

Belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp. 584.494.468.-, Belanja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp. 205.260.000.-, Belanja Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik sebesar Rp. 487.370.000,- , Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik sebesar Rp. 1.869.252.000,- dan Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik sebesar Rp. 787.380.556,-. Belanja Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sebesar Rp. 3.599.406.920.- dan Belanja Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 142.376.990,-

Penyusunan anggaran Tahun 2023, berpedoman pada kesesuaian antara renja dengan RKA, pengalokasian anggaran berdasarkan pada kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU).

Adapun Evaluasi terhadap kegiatan antara lain:

Ditinjau dari capaian kinerja masing-masing sasaran untuk Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar telah dapat melaksanakan tugas utamanya yang menjadi tanggung jawab organisasi perangkat daerah dan yang tidak memenuhi target Kinerja antara lain :

1. Indeks SPBE tidak mencapai target dengan target yang ditetapkan 2,85 yang ditetapkan dengan capaian 2,84 , hal ini disebabkan Kota Pematang Siantar kekurangan di Domain 3 (Domain Manajemen SPBE) di Tauval SPBE termasuk pelaksanaan Audit TIK (Audit Infrastruktur, Aplikasi dan Keamanan). Kota Pematang Siantar Juga belum mempunyai Proses Bisnis yang mengakibatkan belum bisa menyusun Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE yang efektif.

b. Realisasi Program kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan.

1. Persentase Penanganan Aduan SP4N Lapor Periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar 98,8 % , Pengaduan Masyarakat melebihi target yang direncanakan dengan capaian sebesar 141,14%. Hal tersebut dapat menggambarkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan aplikasi SP4N Lapor cukup tinggi dan umpan balik

dari pengelola aplikasi serta OPD yang membidangi lebih proaktif dan efektif.

2. Indeks Keterbukaan Informasi Publik juga Menuju Informatif dibuktikan dengan telah melakukan Self Assesment Quistionnare (SAQ) Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 engan indicator pertanyaan dan penilaian berupa **Pengembangan Website** (mengelola dan mengembangkan Website Utama dan Website OPD), **Pengumuman Informasi Publik**, (berupa informasi public melalui website berita Pematang Siantar dan Website CCTV Pelintas), **Pelayanan Informasi Publik** dan **Penyediaan Informasi Publik**.
3. Persentase OPD yang menggunakan Statistik Sektoral dalam menyusun dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah sebanyak 100% yaitu Dinas Sosial dan P3A, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pariwisata dan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan.
4. Indeks kepuasan masyarakat memenuhi target yang ditentukan dengan melakukan survey quisioner ke 50 orang responden terkait kepuasan terhadap 3 jenis layanan yang ada pada Dinas Komunikasi dan Infomatika Kota Pematang Siantar.
5. Jumlah metadata yang disajikan dalam bentuk buku statistik sektoral adalah metadata

c. Realisasi Program/Kegiatam yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

1. Persentase Penanganan Aduan SP4N Lapor Periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar 98,8 % , dimana target adalah 70 % sehingga realisasi mencapai 141,1 %

d. Faktor faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan

Dalam rangka meningkatkan nilai SPBE Kota Pematang Siantar, Tim Koordinasi SPBE Kota Pematang Siantar bersama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar telah melakukan percepatan selama tahun 2023, diantara sebagai berikut :

1. Penyusunan Peraturan Wali Kota pendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik antara lain Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Pematang Siantar, Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Kota Pematang Siantar, Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Kota Pematang Siantar, dan Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Satu Data Kota Pematang Siantar;
2. Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang bersifat teknis antara lain SOP Pembangunan Aplikasi, SOP Permintaan Sub Domain, SOP Deployment Aplikasi, SOP Manajemen Bandwith, SOP Penyediaan Bandwith, dan SOP Permohonan Jaringan Baru; dan
3. Rapat Koordinasi bersama Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pematang Siantar yang Aplikasi Layanannya digunakan menjadi indikator penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pengumpulan Data Dukung Aplikasi Layanan terkait.

Adapun Hal-hal yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan nilai SPBE Kota Pematang Siantar lebih lanjut adalah sebagai berikut :

- a. Pembuatan Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Pematang Siantar;
- b. Penerapan Sistem Manajemen Risiko SPBE di Kota Pematang Siantar;
- c. Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Kota Pematang Siantar;
- d. Penerapan Sistem Manajemen Pengetahuan SPBE di Kota Pematang Siantar;
- e. Penerapan Sistem Manajemen Perubahan SPBE di Kota Pematang Siantar;
- f. Penyusunan Peraturan Wali Kota Pematang Siantar tentang Audit TIK Kota Pematang Siantar;
- g. Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE Kota Pematang Siantar;
- h. Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE Kota Pematang Siantar; dan
- i. Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE Kota Pematang Siantar;

4. Internet telah menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi perorangan, organisasi, perusahaan, dan instansi pemerintahan, internet digunakan untuk membuat system informasi yang bermanfaat mempermudah tugas-tugas pemerintahan. Manfaat Jaringan Infrastruktur Internet Bagi Pemerintah antara lain : sebagai media yang sangat efektif untuk digunakan dalam menyampaikan informasi resmi yang dilakukan oleh pemerintah, sebagai penyampai aspirasi masyarakat melalui aplikasi pengaduan lainnya, sebagai mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan public. Persentase OPD yang menggunakan internet yang disediakan Oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar sebesar 100 % yang artinya 35 OPD sudah menggunakan internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar.
5. Layanan Publik yang ada di kota Pematang siantar antara lain :
 - SMART BPHTP Pengelola Badan Pengelola Keuangan Daerah
 - SMART PBB Pengelola Badan pengelola Keuangan Daerah.
 - Konfirmasi Status Wajib Pajak Pengelola Badan Pengelola Keuangan Daerah
 - SIMPADU Pengelola Dinas Penanaman Modal PTSP
 - Dukcapil Online Pengelola Dinas Kependudukan dan Catatan Sipildan kelima aplikasi tersebut diatas sudah terintegrasi pada portal Website Pemerintah Kota Pematang Siantar.

e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara urusan Komunikasi dan Informatika, urusan statistik dan urusan persandian, Dinas Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab dalam perumusan konsep penyelesaian permasalahan pembangunan dengan mengacu pada RPJMD Kota Pematang Siantar. Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kota Pematang Siantar yang telah ditetapkan, maka misi Pembangunan Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 adalah : Misi pertama adalah menguatkan kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera, humanis, agamais dan beradab dengan menghargai local

wisdom, misi kedua adalah menguatkan dan memulihkan perekonomian regional, penyehatan iklim usaha perdagangan dan jasa, UMKM dan koperasi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan Misi ke tiga adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien bersih, responsive melayani berdasarkan prinsip good governance dan cooperative governance, misi ke empat adalah menguatkan sentralisasi dan daya tarik kota, guna pencapaian siantar sebagai sub pusat perdagangan dan jasa regional diprovinsi sumatera utara, sedangkan misi kelima adalah mewujudkan kota berkualitas melalui penataan ruang, pengembangan infrastruktur, keindahan dan kebersihan lingkungan kota secara berkelanjutan.

Berdasarkan misi diatas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar sebagai unsur penunjang urusan pemerintah daerah bidang Urusan komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian dalam menjalankan Tugas dan fungsinya mendukung Misi ke Tiga yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih responsive melayani berdasarkan prinsip good governance dan cooperative governance. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat daerah ialah bahwa tidak akan tercapainya Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.

f. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor faktor penyebab.

Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab.

- 1) Melakukan perubahan target program dan kegiatan pada Rencana Strategis dan perjanjian kinerja.
- 2) Melakukan review/telaahan ulang terhadap target program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.
- 3) Merencanakan target fisik dan keuangan yang seimbang agar rencana kerja pencapaiannya maksimal.
- 4) Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah yang menjadi acuan dalam menganalisa kinerja pelayanan Perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja.

Tabel T-C-29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kota Pematang Siantar

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | | Target program dan kegiatan/Sub kegiatan (Renja PD tahun n-1) | Pencapaian Realisasi | |
|---|---|---|---|--|--|--------------------------------|-----------------------|---|---|--|
| | | | | | Target Renja PD tahun (n-2) | Realisasi Renja PD tahun (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022-2027 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran/ Kegiatan/sub s/d dengan tahun (n-3) | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah | Capaian AKIP Perangkat daerah | | | | | | | | |
| | Perencanaan Penganggaran Evaluasi Kinerja Perangkat daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah | 103.477.555 | | | | | | | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah | Jumlah Dokumen Renja dan Renstra | 20.977.555 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan dokumen DPA-SKPD | 20.000.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktislar realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian Kinerja dan iktislar realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian Kinerja dan iktislar realisasi Kinerja | 20.000.000 | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 10.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi | 20.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar melaksanakan fungsi sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian. Pencapaian kinerja ini disajikan berdasarkan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 04 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas-dinas Daerah Kota Pematangsiantar.

Sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan dan tanggungjawab untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah masing-masing.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah daerah untuk menciptakan pemerintah yang transparan dan akuntabel sehingga dapat tercapainya GOOD GOVERNANCE.

Kondisi pemerintah yang baik akan menjadikan pemerintahan yang baik pula sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin baik dan berkualitas. Pemerintah Daerah beserta perangkat-perangkatnya dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya harus diukur kinerjanya berdasarkan aspek keuangan dan aspek non keuangan.

Salah satu perangkat daerah dimaksud adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar yang bertugas membantu kepala daerah yang mempunyai 3 bidang dan 1 sekretariat, yang mempunyai tugas yang berbeda beda dan kinerjanya harus diperhatikan juga. Pengukuran Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perencanaan suatu OPD. Manfaat Pengukuran Kinerja memotivasi Aparatur Sipil Negara untuk melakukan pelayanan sebagai bagian dari upaya memberi kepuasan kepada masyarakat. Salah satu penunjang Pengukuran Kinerja adalah Sarana Prasarana yang ada untuk digunakan dalam mempermudah dan memperlancar pegawai dalam bekerja. Adapun Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah antara lain :

1. Analisis Keuangan

Hasil Pengukuran Kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian suatu indikator tidak semata-mata merupakan output dari suatu sumber dana, tetapi merupakan akumulasi, korelasi dan sinergi antar berbagai program, dengan demikian keberhasilan pembangunan tidak dapat diakui sebagai hasil dari sumber dana atau oleh satu pihak saja. Akumulasi Pengukuran Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar Tahun 2023 untuk Total Belanja **89,97 %** apabila capaian kinerja tersebut dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal adalah berhasil

2. Analisis Pelayanan

Layanan belum terintegrasi. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan keterbatasan sumber dana serta Persandian dan Statistik yang belum optimal sehingga pelayanan belum optimal, dan belum terintegrasinya aplikasi yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan belum memenuhinya regulasi regulasi untuk penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

3. Analisis Sarana dan Prasarana

Hasil pengukuran kinerja berdasarkan sarana dan prasarana belum memadai diakibatkan jaringan infrastruktur online terintegrasi belum sampai ke puskesmas-puskesmas (saat ini hanya di OPD, kecamatan dan kelurahan) diakibatkan keterbatasan dana.

Tabel.T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar

| | Indikator | SPM/standar nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|-----|--|----------------------|-----|---------------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------------|-------------|----------|-------------|------------------|
| | | | | Tahun (n-2) | Tahun (n-1) | Tahun (n) | Tahun (n+1) | Tahun (n-2) | Tahun (n-1) | Tahun N | Tahun (n+1) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | Indeks SPBE | | | 0 | 2,85 | 2,9 | 3,1 | 0 | 2,84 | 2,9 | 3,1 | |
| | Persentase Penanaman keluhan/aduan warga melalui Aplikasi SP4N Lapor | | | 0 | 70 % | 70 % | 75% | | 98,8 | 95,3 | 95,5 | |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat | | | 0 | 80 % | 80 % | 80 % | 0 | 80 | 80 | 80 | |

| Capaian AKIP | | | 0 | CC | B | B | C | CC | B | B |
|---|--|---------------------|---|-------|------|------|------|-------|-------|------|
| Perangkat Daerah | | | 0 | | | | | | | |
| Jumlah Informasi/konten terkait program dan kebijakan pemerintah dan provinsi sesuai dengan strategi komunikasi | | | 0 | 550 | 600 | 650 | 0 | 463 | 600 | 650 |
| Pesentase layanan publik yang terintegrasi pada website portal Pemerintah Kota Pematang Siantar | | | 0 | 80 % | 85 % | 90 % | 85% | 100 % | 100 % | 100% |
| | | | | | | | | | | |
| | | Persentase OPD yang | 0 | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100 % | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|---|-------|------|--|---|------|------|--|
| | | | Tingkat Keamanan Informasi | 0 | 100 % | 100% | | 0 | 100% | 100% | |
|--|--|--|----------------------------------|---|-------|------|--|---|------|------|--|

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perumusan Permasalahan Pembangunan daerah dan analisis isu strategis akan menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan Perangkat Daerah, yaitu tujuan dan sasaran serta perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah dimasa datang. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan atau kesenjangan antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan Pembangunan dapat juga dimaknai sebagai penyebab terjadinya kesenjangan tersebut. Merujuk pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan diklasifikasikan menjadi masalah utama, masalah Pokok masalah dan akar masalahnya.

Berikut dirumuskan yang menjadi permasalahan Pokok Perangkat daerah yang diprioritaskan :

Rumusan Permasalahan

| NO | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|----|--------------------------|--|---|
| 1. | Tata Kelola Pemerintahan | Penyelenggaraan pemerintah belum Optimal | Pemerintahan Yang berbasis elektronik belum berjalan sepenuhnya Pelayanan Pengaduan smart city belum optimal |

Demi mewujudkan Kota Pematangsiantar menjadi kota Sehat Sejahtera dan Berkualitas sebagaimana tertera pada visi dan misi Kota Pematangsiantar. Dalam Visi tersebut memuat pokok visi yang akan dicapai dalam waktu 5 tahun kedepan. Penjabaran pokok- pokok visi yang sesuai dengan bidang Urusan komunikasi dan informatika, urusan Persandian dan urusan Statistik sebagai berikut :

Penjelasan Visi RPJMD

| VISI | Pokok VISI | Penjelasan VISI |
|---|-------------|--|
| Terwujudnya Kota Pematangsiantar Sehat, Sejahtera dan Berkualitas | Berkualitas | Meningkatkan Potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang maju dan Unggul serta berdaya saing melalui peningkatan SDM dan Pengelolaan Sumber daya alam yang ada, Melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, responsife serta konsisten |

| | | |
|--|--|---|
| | | dalam melayani, implementasi regulasi dan kebijakan pembangunan menurut skala prioritas, sebagai kota transit, serta mewujudkan daya tarik sebagai sub pusat perdagangan regional sumatera utara hinterland |
|--|--|---|

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan tersebut, yang menjadi misi kepala daerah yang masih bersifat sementara dan masih dapat disempurnakan, dimana proses penyelesaian RPJMD paling lama adalah 6 bulan sejak pelantikan kepala Daerah terpilih, yang sesuai dengan misi perangkat daerah adalah sebagai berikut :

Penjelasan Misi RPJMD

| MISI | PENJELASAN MISI |
|---|---|
| Meningkatkan tata Kelola Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsive melayani berdasarkan prinsip Good governance dan cooperative governance | Bertujuan untuk meningkatkan pelayanan public terbaik kepada masyarakat dengan penerapan birokrasi yang cepat, tepat baik secara digital dan langsung dengan pelayanan yang professional. |

Dalam rangka mendapatkan kualitas perencanaan yang berkelanjutan, maka pada setiap tingkatan dan tahapan perencanaan diperlukan keselarasan dan konsistensi, keselarasan hubungan antara visi, misi sebagai berikut

Keselarasan RPJPD dan RPJMD Kota Pematangsiantar

| RPJPD Kota Pematangsiantar 2005-2025 | | RPJMD Kota Pematangsiantar 2021-2026 |
|--|--|--|
| VISI | | |
| Mewujudkan kota Pematangsiantar sebagai Pusat Perdagangan dan jasa, yang mantap, maju dan jaya, dengan dukungan sektor Pendidikan, | | Terwujudnya Kota Pematangsiantar sehat sejahtera dan Berkualitas |

| | | |
|--|--|---|
| kesehatan, Infrastruktur dan Pariwisata | | |
| MISI | | |
| <p>Misi 1</p> <p>Mengembangkan Pelaksanaan Tata pemerintahan yang baik (Good Governance)</p> | | <p>MISI 3</p> <p>Meningkatkan Tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih responsive melayani berdasarkan prinsip good governance dan cooperative governance</p> |

Keselarasan RPJMD Provinsi Sumatera Utara dengan RPJMD Kota Pematangsiantar

| | | |
|---|--|---|
| PERUBAHAN RPJMD SUMATERA UTARA 2019-2023 | | RPJMD Kota Pematangsiantar 2021-2026 |
| VISI | | |
| Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat | | Terwujudnya Kota Pematangsiantar sehat sejahtera dan Berkualitas |
| MISI | | |
| <p>Misi 2</p> <p>Bermartabat dalam politik : Mewujudkan sumatera utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintahan yang baik, adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki</p> | | <p>MISI 3</p> <p>Meningkatkan Tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih responsive melayani berdasarkan prinsip good governance dan cooperative governance</p> |

yang menjadi Isu-isu strategis Bidang Komunikasi dan Informatika serta Persandian dan Statistik adalah sebagai berikut :

- ✓ Penguatan data center yang menjadi pusat data pemerintah kota
- ✓ Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Kominfo.
- ✓ Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.
- ✓ Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi public, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kota.
- ✓ Peraturan Daerah atau Kepala Daerah terkait implementasi E government
- ✓ Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi dan kompetensi dibawah pengelolaan Dinas Kominfo
- ✓ Informasi tentang Sumber daya yang tersedia untuk pelayanan
- ✓ Akses Publik terhadap informasi keuangan daerah
- ✓ Sistem Informasi manajemen Pemerintah Kota
- ✓ Pembentukan Regulasi regulasi dalam mendukung Penyelenggraan SPBE
- ✓ Indeks Penyelenggraan SPBE
- ✓ Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan Pembangunan Daerah.
- ✓ Persentase OPD Yang menggunakan data statistic dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah
- ✓ Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah

1. Globalisasi

Globalisasi adalah suatu fenomena dalam peradaban manusia yang bergerak secara terus menerus. Kehadiran teknologi informasi dan komunikasi mempercepat akselerasi proses globalisasi ini. Pesatnya pembangunan teknologi informasi dan komunikasi dapat dilihat dari berbagai fasilitas di setiap rumah dan kantor dilengkapi dengan telepon, mesin fax, televisi kabel dan internet.

Dimasa-masa pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informatika saat ini muncul isu-isu politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Salah satu isu yang terkait dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informatika adalah isu ekonomi yang tidak kalah penting dimana perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat bertransaksi. Hal ini terkait dengan semakin maraknya e-commerce yang berkaitan dengan adanya financial teknologi (findtech), e-banking, e-mall dan fasilitas yang memegang perekonomian lainnya.

Seiring kemajuan zaman, pemerintah daerah dituntut untuk selalu mengembangkan ilmu pengetahuan dengan cara mengikuti perkembangan teknologi agar para aparatur berdaya saing tinggi dan memiliki kemampuan agar dapat mengoptimalkan pelayanannya sehingga daerah dapat berkembang secara optimal.

2. Peraturan Perundang-undangan

Dibutuhkan komitmen dari semua pihak, pemerintah, dan masyarakat serta pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata supaya penyelenggaraan Good Governance dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

a. Tantangan dan Peluang

Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tupoksinya merupakan lembaga teknis daerah yang cukup strategis dalam menentukan kebijakan program pengembangan bidang Komunikasi dan Informatika, maka diperlukan faktor pendukung, yang merupakan kekuatan, ancaman, peluang dan kelemahan baik faktor pendukung internal maupun eksternal.

Faktor Internal dan eksternal dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Faktor Internal

a. Kekuatan

- Dukungan Pemerintah Kota Pematangsiantar dibidang Komunikasi dan Informatika serta Persandian dan Statistik melalui Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar dan Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 4 tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas-dinas Daerah Kota Pematangsiantar.
- Sebagai Lembaga teknis daerah yang melakukan koordinasi pengembangan dibidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan

Persandian, dapat bertindak sebagai pemberi pertimbangan teknis bagi OPD serta sebagai konsultan perencanaan pengembangan sistem informasi. Pada saat ini Dinas Komunikasi dan Informatika telah membangun jaringan internet semua OPD dan kecamatan.

- Tersedianya sistem aplikasi online dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang terintegrasi.
- Tersedianya command center yang merupakan bagian pengembangan pelaksanaan e-government.
- Ketersediaan dana untuk membiayai kegiatan dalam menjalankan tupoksinya.
- Tersedianya sarana prasarana dalam menunjang perencanaan dan pengembangan.

b. Kelemahan

- Masih kurang dipahaminya tupoksi oleh sebagian Aparatur Sipil Negara, mengingat Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar baru dibentuk.
- Keterbatasan SDM (Kuantitas maupun kualitas)
- Belum adanya regulasi terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Belum adanya keamanan informasi pemerintah daerah
- Belum adanya OPD yang menggunakan statistic dalam menyusun perencanaan daerah dan untuk evaluasi pembangunan daerah
- Belum optimalnya pengelolaan database, sehingga implementasi E-Government belum sepenuhnya didukung oleh ketersediaan data yang cepat dan tepat dan akurat.
- Kurangnya pendidikan dibidang komunikasi dan Informatika terhadap aparatur pemerintah.

2. Faktor Eksternal

a. Peluang

- Adanya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang memberikan peran yang lebih besar kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya.

- Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun dokumen perencanaan seperti RPJPD, RPJMD, dan RKPD dan OPD diwajibkan menyusun Renstra dan Renja OPD.

b. Tantangan

- Banyaknya peraturan baru berkaitan dengan proses dan produk perencanaan dan penganggaran.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar masih belum sepenuhnya mampu menciptakan koordinasi dan keterpaduan pengembangan disemua komponen yang ada.
- Masyarakat yang semakin kritis terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan.
- Kekhawatiran ketersediaan anggaran yang kurang memadai.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel T-C.31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar

| Rancangan Awal RKPD | | | | | |
|---------------------|---|---------|--|-------------------|-------------------------------|
| No | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu indikatif (Rp.000) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah | Kominfo | Nilai (Capaian) AKIP Perangkat daerah | B | 5.610.550 |
| | | | Indeks kepuasan masyarakat | 80 | |
| | | | Inovasi Perangkat Daerah | 1 | |
| | Perencanaan Penganggaran Evalausi Kinerja Perangkat daerah | Kominfo | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah | 1 Dokumen | 20.000.000 |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah | Kominfo | Jumlah Dokumen Renja dan Renstra | 2 Dokumen | 5.000.000 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Kominfo | Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 5.000.000 |
| | Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktislar realisasi Kinerja SKPD | Kominfo | Jumlah laporan capaian Kinerja dan iktislar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan iktislar realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | 5.000.000 |
| | Evaluasi Kinerja Prangkat Daerah | Kominfo | Jumlah dokumen Evaluasi Renja, LAKIP, LPPD, LKPJ | 8 Laporan | 5.000.000 |
| | Administrasi Keuangan Perangkat daerah | Kominfo | Cakupan administrasi keuangan Perangkat daerah | 1 Tahun (100%) | 3.422.500.000 |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kominfo | Jumlah Bulan Penerimaan Gaji dan Tunjangan Aparatur PNS yang dibayarkan | 35 orang/bulan | 3.449.550.000 |
| | Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kominfo | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | 5.000.000 |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kominfo | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian | 1 Dokumen | 11.000.000 |

| | | | | | | |
|--|--|---------|--|----------------|--|-------------|
| | | | Kantor yang disediakan | | | |
| | Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan | Kominfo | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan | 4 paket | | 30.000.000 |
| | Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan | Kominfo | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 1 Dokumen | | 100.000.000 |
| | Fasilitas Kunjungan Tamu | Kominfo | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | 1 Laporan | | 10.000.000 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kominfo | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 50 Laporan | | 150.000.000 |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kominfo | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 12 Dokumen | | 25.000.000 |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kominfo | Cakupan Sarana penunjang Perangkat Daerah | 1 Tahun (100%) | | 530.000.000 |
| | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kominfo | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 1 Unit | | 200.000.000 |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Iapangan | Kominfo | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Iapangan yang Disediakan | 1 Unit | | 20.000.000 |
| | Pengadaan Mebel | Kominfo | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Paket | | 100.000.000 |
| | Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya | Kominfo | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya | 15 Unit | | 100.000.000 |
| | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Kominfo | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | | 100.000.000 |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kominfo | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | | 10.000.000 |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kominfo | Cakupan Sarana penunjang Perangkat Daerah | 1 Tahun (100%) | | 410.000.000 |

| | | | | | |
|--|---|---------|--|----------------|-------------|
| | Penyediaan Jasa Surat menyurat | Kominfo | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4 Laporan | 5.000.000 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kominfo | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 laporan | 80.000.000 |
| | Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kominfo | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Laporan | 25.000.000 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kominfo | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 4 laporan | 300.000.000 |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kominfo | Jumlah Pemeliharaan Rutin Barang Milik Daerah | 1 Tahun (100%) | 510.000.000 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kominfo | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 Unit | 50.000.000 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kominfo | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Laporan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 11 Unit | 100.000.000 |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kominfo | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang Dipelihara | 50 Unit | 100.000.000 |
| | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Kominfo | Jumlah Aset Tetap yang dipelihara | 2 Unit | 150.000.000 |
| | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kominfo | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 1 unit | 100.000.000 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya | Kominfo | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 2 Unit | 150.000.000 |
| | URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | |

| | | | | | |
|--|--|---------|--|-----------|-------------|
| | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | Kominfo | Persentase Konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi | | 957.693.661 |
| | | | Persentase Penanganan Aduan SP4N lapor | | |
| | Pengelolaan Informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Kota | Kominfo | Jumlah Informasi /Konten Publik | | 957.693.661 |
| | Perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik | Kominfo | Jumlah dokumen hasil perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik | 2 Dokumen | 5.693.661 |
| | Monitoring opini dan aspirasi publik | Kominfo | Jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik | 1 Dokumen | 107.000.000 |
| | Monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah daerah | Kominfo | Jumlah dokumen hasil monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | 10.000.000 |
| | Pengelolaan konten dan perencanaan Media Komunikasi Publik. | Kominfo | Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan perencanaan Media Komunikasi Publik | 1 Dokumen | 250.000.000 |
| | | | | | |
| | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Kominfo | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Media Komunikasi Publik | 1 Dokumen | 325.000.000 |
| | Pelayanan Informasi Publik | Kominfo | Jumlah dokumen Pelayanan Informasi Publik | 1 Dokumen | 225.000.000 |
| | Layanan Hubungan Media | Kominfo | Jumlah Layanan Hubungan Media | 1 Layanan | 5.000.000 |
| | Manajemen Komunikasi krisis | Kominfo | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi krisis | 1 Dokumen | 5.000.000 |

| | | | | | |
|--|--|---------|---|-----------|---------------|
| | Penyelenggaraan hubungan masyarakat media kemitraan komunitas | Kominfo | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau kebijakan | 1 Dokumen | 5 000.000 |
| | Penyediaan pengadaan saran dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota | Kominfo | Jumlah sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota | 1 Unit | 10.000.000 |
| | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | Kominfo | Persentase Layanan Publik yang terintegrasi pada website portal Pemerintah Kota Pematang Siantar | 90 % | 4.868.944.682 |
| | Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintahan Daerah kabupaten/kota | Kominfo | Jumlah domain yang ditetapkan oleh pemerintah pusat | 1 Domain | 44.000.000 |
| | Pendaftaran Nama Domain Pemerintah kabupaten/kota | Kominfo | Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah kabupaten/kota | 1 Domain | 22.000.000 |
| | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Kominfo | Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 22.000.000 |
| | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah daerah kabupaten/kota | Kominfo | Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar | 100 % | 4.825.944.682 |
| | Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Kominfo | Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 1 Dokumen | 120.944.682 |
| | Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik | Kominfo | Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana induk dan anggaran pemerintah | 1 Dokumen | 25.000.000 |

| | | | | | | |
|--|---|----------------|--|--------------------|--|---------------|
| | | | <i>berbasis elektronik</i> | | | |
| | Pengelolaan Pusat data Pemerintah daerah | <i>Kominfo</i> | Jumlah pusat data yang dikelola | 1 Unit | | 2.800.000.000 |
| | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | <i>Kominfo</i> | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | | 1.000.000.000 |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan | <i>Kominfo</i> | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan | 1 Dokumen | | 100.000.000 |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik | <i>Kominfo</i> | Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan | 7 Perangkat daerah | | 60.000.000 |
| | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | <i>Kominfo</i> | Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan | 1 unit | | 220.000.000 |
| | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah | <i>Kominfo</i> | Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah | 2 Layanan | | 100.000.000 |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas | <i>Kominfo</i> | Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan <i>Masterplan Smart City</i> | 1 Dokumen | | 100.000.000 |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | <i>Kominfo</i> | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | | 100.000.000 |
| | Pengelolaan <i>Government Chief Information Officer</i> | <i>Kominfo</i> | Jumlah Dokumen Pengelolaan <i>Government Chief</i> | 1 Dokumen | | 100.000.000 |
| | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | <i>Kominfo</i> | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan | 1 Dokumen | | 100.000.000 |
| | URUSAN STATISTIK | | | | | |
| | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | <i>Kominfo</i> | Jumlah Metadata Yang disajikan | 14 Metadata | | 153.015.000 |

| | | | Persentase OPD yang menggunakan statistik sektoral dalam menyusun dan mengevaluasi perencanaan Pembangunan Kota Pematang siantar | 100 % | |
|--|---|---------|--|-------------|-------------|
| | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup | Kominfo | Tersedianya meta data dalam buku statistik sektoral | 18 Metadata | 153.015.000 |
| | Kordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, | Kominfo | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | 1 Dokumen | 100.000.000 |
| | Membangun Metadata Statistik Sektoral | Kominfo | Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang | 1 Dokumen | 13.015.000 |
| | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik | Kominfo | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat | 33 OPD | 20.000.000 |
| | Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di | Kominfo | Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun | 1 Dokumen | 11.500.000 |
| | Pembangunan Infrastruktur | Kominfo | Jumlah infrastruktur statistik | 1 unit | 10.000.000 |
| | Penyelenggaraan otoritas statistik sektoral di daerah | Kominfo | Jumlah data statistik sektoral yang dihimpun | 1 dokumen | 10.000.000 |
| | URUSAN PERSANDIAN | | | | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Kominfo | Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (Indeks KAMI) | 100 % | 57.134.393 |
| | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kominfo | Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah | 100 % | 52.134.393 |
| | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kominfo | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang | 1 Dokumen | 42.134.393 |
| | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan | Kominfo | Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan | 1 laporan | 5.000.000 |

| | | | | | |
|--|---|---------|--|-------|-----------|
| | Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | |
| | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kominfo | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi | 2 OPD | 5.000.000 |
| | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | Kominfo | Jumlah OPD yang menerapkan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah | 1 OPD | 5.000.000 |
| | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kominfo | Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi | 1 OPD | 5.000.000 |

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2025 Kota Pematang Siantar

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|---|---------|---|----------------|-------------------------|--|---------|---|----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target Capaian | Pagu indikator (Rp.000) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target Capaian | Pagu indikator (Rp.000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah | Kominfo | Capaian AKIP Perangkat daerah | B | 5.610.550.000 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah | Kominfo | Capaian AKIP Perangkat daerah | B | | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat daerah | Kominfo | Cakupan administrasi keuangan Perangkat daerah | 1 Tahun | 3.422.500.000 | Administrasi Keuangan Perangkat daerah | Kominfo | Cakupan administrasi keuangan Perangkat daerah | 1 Tahun | 3.000.000.000 | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kominfo | Jumlah Bulan Penerimaan Gaji dan Tunjangan Aparatur PNS yang dibayarkan | 14 Bulan | 3.449.550.000 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kominfo | Jumlah Bulan Penerimaan Gaji dan Tunjangan Aparatur PNS yang dibayarkan | 14 Bulan | 3.000.000.000 | |
| | Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kominfo | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | 5.000.000 | | | | | | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Keuangan SKPD | Kominfo | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | 11.000.000 | | | | | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kominfo | Jumlah Laporan keuangan akhir tahun | 11Lap | 5.000.000 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|--|-----------|-------------|--|--|--|--|---------|---|--|
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD | Kominfo | Jumlah Dokumen laporan keuangan bulanan, triwulan dan semesteran | 11Lap | 5.000.000 | | | | | | | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kominfo | Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 % | 80.000.000 | | | | | | | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya | Kominfo | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya | 1 paket | 20.000.000 | | | | | | | |
| | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Kominfo | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai | 1 Dokumen | 20.000.000 | | | | | | | |
| | Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi | Kominfo | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 35 orang | 20.000.000 | | | | | | | |
| | Sosialisasi peraturan perundang-undangan | Kominfo | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan | 35 Orang | 10.000.000 | | | | | | | |
| | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Kominfo | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 25 Orang | 15.000.000 | | | | | | | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kominfo | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1 Tahun | 440.000.000 | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kominfo | Sakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1 tahun |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Kominfo | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 15.000.000 | | | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Kominfo | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 paket |
| | | | | | | | | | | | | Banyaknya Komponen listrik yang dibutuhkan |
| | | | | | | | | | | | | 50.000.000 |
| | | | | | | | | | | | | 1.0827.000.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|---|---------|------------|--|--------------|---|---------|-------------|--|
| | | | | | | | | | | | untuk CC, data Center, Media Center dan Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Oematang Siantar |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kominfo 0 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan | 4 Pket | 40.000.000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kominfo 0 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan | 4 paket | 100.000.000 | Banyaknya kebutuhan untuk alat tulis kantor |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kominfo 0 | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan | 4 paket | 20.000.000 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kominfo 0 | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan | 4 paket | 50.000.000 | Banyaknya dibutuhkan alat alat kebersihan untuk Command Center, data center, media center dan kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kominfo 0 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | 4 paket | 50.000.000 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kominfo 0 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | 4 paket | 77.700.000 | Banyaknya kebutuhan untuk rapat- rapat koordinasi |

| Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | o | Daerah | 1 Unit | 200.000.000 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kominfo | o | Daerah | 1 unit | 500.000.000 | Pengantian kendaraan dinas Jabatan Kepala Dinas |
|--|---------|--|------------|-------------|---|---------|---|---|---------|-------------|--|
| Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kominfo | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 1 Unit | 200.000.000 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kominfo | o | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 1 unit | 500.000.000 | Pengantian kendaraan dinas Jabatan Kepala Dinas |
| Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan | Kominfo | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan | 1 Unit | 20.000.000 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan | Kominfo | o | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan | 1 unit | 30.000.000 | Pengadaan kendaraan dinas lapangan |
| Pengadaan Mebel | Kominfo | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Paket | 100.000.000 | | | | | | | |
| Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya | Kominfo | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya | 10 Unit | 100.000.000 | Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya | Kominfo | o | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya | 10 Unit | 500.000.000 | Pengadaan server dll |
| Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Kominfo | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | 100.000.000 | | | | | | | |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kominfo | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | 10.000.000 | | | | | | | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kominfo | Cakupan Sarana penunjang Perangkat Daerah | 1 Tahun | 410.000.000 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kominfo | o | Cakupan Sarana penunjang Perangkat Daerah | 1 tahun | 640.000.000 | |
| Penyediaan Jasa Surat menyurat | Kominfo | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4 Laporan | 5.000.000 | Penyediaan Jasa Surat menyurat | Kominfo | o | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4 lap | 10.000.000 | Diperlukan untuk dokumen kerjasama dengan pihak ketiga |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber | Kominfo | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber | 12 laporan | 80.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber | Kominfo | o | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber | 12 lap | 130.000.000 | Kebutuhan rekening |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|--|----------------------|-------------|--|--|---------|--|---------------|---------------|---|
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kominfo | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi | 2 unit | 100.000.000 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kominfo | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi | 2 unit | 100.000.000 | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kominfo | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 1 unit | 150.000.000 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kominfo | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 1 unit | 150.000.000 | |
| | URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | | | | | | | |
| | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | Kominfo | Persentase Konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi | 600 informasi/konten | 957.693.661 | | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | Kominfo | Persentase Konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi | | 3.800.000.000 | |
| | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Daerah Kota | Kominfo | Jumlah Informasi Publik | 600 Informasi/konten | 957.693.661 | | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Daerah Kota | Kominfo | Jumlah Informasi Publik | 600 Informasi | | Belanja kerja sama untuk percepatan penyebaran informasi publik |
| | Perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik | Kominfo | Jumlah dokumen hasil perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik | 2 dokumen | 5.693.661 | | | | | | | |
| | Monitoring opini dan aspirasi publik | Kominfo | Jumlah dokumen hasil monitoring/opini dan aspirasi publik | 1 Dokumen | 10.000.000 | | | | | | | |
| | Pengelolaan konten dan perencanaan Media Komunikasi | Kominfo | Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan perencanaan Media | 1 Dokumen | 250.000.000 | | Pengelolaan konten dan perencanaan Media Komunikasi | Kominfo | Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan perencanaan Media | 1 dok | 800.000.000 | Belanja gaji tenaga ahli untuk |

| | Publik. | Komunikasi Publik | | | Publik. | | Komunikasi Publik | | | | pengelolaan konten |
|--|---|-------------------|---|-----------|-------------------|--|-------------------|--|-------|-------------------|--|
| | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Kominfo 0 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Media Komunikasi Publik | 1 Dokumen | 325.000.000 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Kominfo 0 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Media Komunikasi Publik | 1 dok | 2.000.000.00 0 | Belanja untuk media dalam penyampaian informasi publik |
| | Pelayanan Informasi Publik | Kominfo 0 | Jumlah dokumen Pelayanan Informasi Publik | 1 Dokumen | 225.000.000 | Pelayanan Informasi Publik | Kominfo 0 | Jumlah dokumen Pelayanan Informasi Publik | 1 dok | 1.000.000.00 0 | Belanja untuk cetak spanduk dan baliho |
| | Layanan Hubungan Media | Kominfo 0 | Jumlah Layanan Hubungan Media | 1 Layanan | 5.000.000 | | | | | | |
| | Manajemen Komunikasi krisis | Kominfo 0 | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi krisis | 1 Dokumen | 5.000.000 | | | | | | |
| | Penyelenggaraan hubungan masyarakat media kemitraan komunitas | Kominfo 0 | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau kebijakan | 1 Dokumen | 5.000.000 | | | | | | |
| | Penyediaan pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah kabupaten/kota | Kominfo 0 | Jumlah sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota | 1 Unit | 10.000.000 | | | | | | |
| | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | Kominfo 0 | Persentase Layanan Publik yang terintegrasi pada website portal Pemerintah Kota Pematang Siantar | 85 % | 4.869.944,68 2 | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | Kominfo 0 | Persentase Layanan Publik yang terintegrasi pada website portal Pemerintah Kota Pematang Siantar | 85 % | 5.050.000.00 0 | |

| | | | | | | | | | |
|--|---------|---|-----------|---------------|---|---------|---|-----------|---------------|
| Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/kota | Kominfo | Jumlah domain yang diterbitkan oleh pemerintah pusat | 1 Domain | 44.000.000 | | | | | |
| Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/kota | Kominfo | Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/kota | 1 Domain | 22.000.000 | | | | | |
| Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Kominfo | Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 22.000.000 | | | | | |
| Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah daerah kabupaten/kota | Kominfo | Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar | 100 % | 4.825.944,682 | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah daerah kabupaten/kota | Kominfo | Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar | 100 % | |
| Penatalaksanaan dan pengawasan E-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota | Kominfo | Jumlah dokumen hasil penatalaksanaan dan pengawasan E-Government dalam penyelenggaraan pemerintah daerah | 1 dokumen | 120.944.682 | Penatalaksanaan dan pengawasan E-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota | Kominfo | Jumlah dokumen hasil penatalaksanaan dan pengawasan E-Government dalam penyelenggaraan pemerintah daerah | 1 dokumen | 500.000.000 |
| Sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintah berbasis elektronik | Kominfo | Jumlah dokumen hasil sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintah berbasis elektronik | 1 dokumen | 25.000.000 | Sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintah berbasis elektronik | Kominfo | Jumlah dokumen hasil sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintah berbasis elektronik | 1 dokumen | 500.000.000 |
| Pengelolaan Pusat data Pemerintah daerah | Kominfo | Jumlah pusat data yang dikelola | 1 Unit | 2.800.000,000 | Pengelolaan Pusat data Pemerintah daerah | Kominfo | Jumlah pusat data yang dikelola | 1 unit | 3.000.000,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---|--------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|-------------|--|
| Penyelenggaraan Sistem komunikasi Intra Pemerintah Daerah | Kominfo | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | 1.000.000.000 | | | | | | | | | | |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan | Kominfo | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan | 1 Dokumen | 100.000.000 | Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan | | | | | | | 1 dok | 400.000.000 | Belanja untuk koordinasi terkait sistem keamanan informasi |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik | Kominfo | Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan | 7 Perangkat daerah | 60.000.000 | | | | | | | | | | |
| Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Kominfo | Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan | 1 unit | 220.000.000 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | | | | | | | 1 unit | 500.000.000 | Belanja Untuk pengembangan an Proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik |
| Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah | Kominfo | Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah | 2 Layanan | 100.000.000 | | | | | | | | | | |
| Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas | Kominfo | Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City | 1 Dokumen | 100.000.000 | | | | | | | | | | |
| Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi | Kominfo | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi | 1 Dokumen | 100.000.000 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|---|-----------|------------|-----------|--|--------------|---|-------|-------------|---|
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Kominfo o | Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (Indeks KAMI) | 100 % | 57.134.393 | 100 % | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Kominfo o | Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (Indeks KAMI) | 100 % | 600.000.000 | |
| | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kominfo o | Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah | 100 % | 52.134.393 | 100 % | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kominfo o | Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah | 100 % | | |
| | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kominfo o | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang | 1 Dokumen | 42.134.393 | 1 Dokumen | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kominfo o | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang | 1 dok | 200.000.000 | |
| | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kominfo o | Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 1 laporan | 5.000.000 | 1 laporan | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kominfo o | Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 1 lap | 200.000.000 | Belanja Peningkatan kapasitas sumber daya keamanan informasi |
| | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Kominfo o | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 1 laporan | 5.000.000 | 1 laporan | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Kominfo o | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 1 lap | 200.000.000 | Belanja untuk mencapai tingkat keamanan informasi |
| | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kominfo o | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi | 2 OPD | 5.000.000 | 2 OPD | | | | | | |
| | Penetapan Pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah | Kominfo o | Jumlah OPD yang menerapkan pola hubungan komunikasi sandi | 1 OPD | 5.000.000 | 1 OPD | | | | | | |

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Tidak adanya usulan program kegiatan dari masyarakat dan pemangku kepentingan atau pokir

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|-------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| NIHIL | | | | | |

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah dan kebijakan umum nasional bidang komunikasi dan informatika adalah :

1. Penyusunan kebijakan dan regulasi demi terciptanya penggunaan dan pemanfaatan sumber daya komunikasi dan informatika (telekomunikasi, media dan informatika).
2. Perwujudan penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya seoptimal mungkin, mewujudkan iklim persaingan sehat, memenuhi standar kualitas pelayanan prima.
3. Penciptaan sumber daya manusia yang unggul yang mampu menjadi tenaga ahli terampil untuk mengisi lapangan kerja dibidang komunikasi dan informatika.

Adapun prioritas pembangunan nasional bidang komunikasi dan informatika adalah :

- a. Program prioritas pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika melalui penguatan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika seperti sector penyiaran, sector aplikasi, sector telekomunikasi dan sector informasi public dengan memperhatikan kecenderungan konvergensi antar sector. Mendorong terjadinya pemakaian bersama sumber daya, sarana dan prasarana komunikasi dan infomatika dengan seperangkat kebijakan dan regulasi.
- b. Program prioritas penyelenggaraan pos dan informatika melalui penguatan infrastruktur, layanan dan kandungan informasi, serta menjangkau seluruh pelosok. Selain itu juga diarahkan pada penguatan kapabilitas masyarakat melalui pengembangan TIK berbasis local, peningkatan e-literacy masyarakat, pembentukan komunitas Informasi Masyarakat (KIM) secara aktif menggali, mengolah dan menyebarkan informasi secara bertanggungjawab, serta pembangunan desa informatif
- c. Program prioritas aplikasi informatika melalui pengembangan aplikasi telematika yang dapat menciptakan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, yaitu pengembangan sistem layanan pemerintahan

yang terintegrasi dan memiliki interoperabilitas yang mampu menciptakan sistem e-government nasional, sekaligus bermanfaat bagi masyarakat dalam memperoleh layanan public.

- d. Program prioritas pengembangan informasi dan komunikasi publik melalui penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi dilaksanakan oleh pemerintah secara aktif mengumpulkan informasi bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat, menyebarkan informasi bermanfaat secara merata kepada seluruh elemen masyarakat.

Adapun tujuan pembangunan urusan komunikasi dan informatika yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar adalah Mewujudkan tata kelola komunikasi dan informasi yang sehat, efisien dan aman, meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi, menciptakan sumber daya TIK yang unggul, produktif dan berdaya saing, menciptakan ketersediaan informasi public yang sistematis, terpadu dan tanggap terhadap perubahan.

3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut adalah sebagai berikut :

MISI : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsive melayani berdasarkan prinsip good governance dan cooperative governance

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

| Tujuan Perangkat Daerah | Sasaran | Indikator | Arah kebijakan |
|--|--|-------------------------------------|----------------|
| Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien | Meningkatkan kualitas pelayanan publik | Indeks SPBE | |
| | | Indeks KAMI | |
| | | Indeks Smart City | |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | |
| | | Indeks Keterbukaan Informasi Publik | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | | Indeks Pembangunan Statistik | |
| | | Jumlah inovasi perangkat Daerah | |
| | Meningkatnya akuntabilitas Kinerja perangkat Daerah | Nilai AKIP perangkat Daerah | |

3.3 Program dan Kegiatan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar memiliki 3 Urusan antara lain Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Bidang Statistik, dan Urusan Bidang Persandian

Dimana Yang Pengampu salah satu prioritas Pembangunan Daerah Kota pematangsiantar adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar Yaitu **Program Aplikasi Informatika** sebagai hasil rumusan pencapaian Visi dan Misi dengan **Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan** dimana untuk mencapai Misi 3 Yaitu : Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang efektif , efisien, bersih, responsive melayani berdasarkan good governance dan cooperative governance

Dimana Tujuan 3.1 adalah : Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan yang menjadi Sasaran 3.1.1. adalah : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan 3.1.2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang mana untuk mencapai misi tersebut dirumuskanlah suatu permasalahan yaitu

| NO | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|----|--------------------------|--|---|
| 1. | Tata Kelola Pemerintahan | Penyelenggaraan pemerintah belum Optimal | Pemerintahan Yang berbasis elektronik belum berjalan sepenuhnya |

Yang menjadi Indikator Kinerja Sasaran Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027 Untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar adalah *Indeks SPBE, Indeks Kami, Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks Keterbukaan Informasi Publik, Indeks Pembangunan Statistik, Nilai Akip Perangkat Daerah, Inovasi perangkat daerah dan Indeks Smart City*

dan yang menjadi Indikator Kinerja Daerah untuk urusan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Persandian dan Urusan Statistik adalah sebagai berikut :

- ✓ Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Kominfo.
- ✓ Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Pada Portal Pemerintah Kota Pematang Siantar.

- ✓ Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan Pembangunan Daerah dan mengevaluasi pembangunan daerah
- ✓ Jumlah informasi/konten
- ✓ Nilai Akip Perangkat daerah
- ✓ Jumlah Inovasi perangkat Daerah
- ✓ Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah

Yang mana Indikator Kinerja Daerah tersebut merupakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) OPD Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pematangsiantar. Untuk mencapai target yang telah ditetapkan maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematagsiantar merencanakan Rencana Kerja untuk tahun 2025 antara lain :

Pada dasarnya program dan kegiatan merupakan upaya guna mengimplementasikan strategi dan kebijakan OPD dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Dengan kata lain bahwa program merupakan instrumen dari suatu kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD atau merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program.

Selanjutnya pada program dan kegiatan haruslah memiliki alat ukur yang jelas dan dibuat guna menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pada suatu program dan kegiatan yang disebut dengan indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan dari suatu program dan kegiatan baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai bentuk pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat pemantauan dan evaluasi.

Adapun program dan kegiatan yang direncanakan berdasarkan sasaran pembangunan pada tahun 2025, adalah sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten Kota

Kegiatan :

- Perencanaan Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisiar realisasi kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan :

- Administrtasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan gaji dan Tunjangan
- Penyediaan Administrtasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan bulanan/triwulan semesteran SKPD

Kegiatan:

- Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah

Sub kegiatan :

- Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
- Monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai
- Sosialisasi peraturan perundang-undangan
- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Kegiatan :

- Administrasi Umum Perangkat daerah

Sub kegiatan :

- Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor
- Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan peralatan rumah tangga
- Penyediaan bahan logistic kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Fasilitas kunjungan tamu.
- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- Penatausahaan Arsip dinamis SKPD

Kegiatan :

- Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub kegiatan :

- Pengadaan Kendaraan dinas perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan

- Pengadaan kendaraan dinas atau lapangan
- Pengadaan mebel
- Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
- Pengadaaan asset tetap lainnya
- Pengadaan sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

Kegiatan :

- Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah daerah

Sub Kegiatan

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa pelayanan umum Kantor

Kegiatan :

- Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub kegiatan :

- Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas perorangan dinas atau kendaraan dinas.
- Penyediaan jasa pemeliharaaa
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Kegiatan :

- Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintah daerah

Sub kegiatan:

- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas
- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- Pemeliharaan asset tetap lainnya

II. Program Informasi dan Komunikasi Publik

Kegiatan :

- Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Kabupaten Kota

Sub kegiatan :

- Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
- Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
- Pelayanan Informasi Publik

III. Program Penyelenggaraan Statistik sektoral

Kegiatan :

- Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota

Sub kegiatan :

- Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan pengolahan analisa dan desiminasi data statistik sektoral.

IV. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Kegiatan :

- Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota

Sub Kegiatan :

- Pengelolaan pusat data pemerintah daerah
- Pengembangan Aplikasi dan Proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik
- Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan system SPBE
- Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem keamanan Informasi
- Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik.

V. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Kegiatan :

- Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Pentapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan jarring Komunikasi sandi Pemerintah Daerah kabupaten/Kota

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | |
|------|--|---|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------------------|--------------------|---|--|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Nilai (Capaian AKIP Perangkat daerah | Kominfo | B | Rp. 6.193.700.000. | DAU | | B | Rp. 6.193.700.000. | |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Kominfo | 80 | | | | | | |
| | | Inovasi Perangkat Daerah | Kominfo | 1 | | | | | | |
| | Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah | Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah | Kominfo | 1 Dok | Rp. 20.700.000. | DAU | | 1 Dok | Rp. 20.700.000. | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah | | Kominfo | 2 Dok | Rp. 5.200.000. | DAU | | 2 Dok | Rp. 5.200.000. | |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen DPA- SKPD | Kominfo | 1Dok | Rp. 5.500.000. | DAU | | 1 Dok | Rp. 5.500.000. | |
| | Koordinasi dan penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja SKPD | Kominfo | 1 lap | Rp. 5.000.000. | DAU | | 1 lap | Rp. 5.000.000. | |
| | Evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | Kominfo | 8 lap | Rp. 5.000.000. | DAU | | 8 lap | Rp. 5.000.000. | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat daerah | | Kominfo | | Rp. 3.026.500.000. | DAU | | | Rp. 3.026.500.000. | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN | Kominfo | 14 bulan | Rp. 3.000.000.000. | DAU | | 14 Bulan | Rp. 3.000.000.000. | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---------|---------|--------------------|-----|--|---------|--------------------|
| | | | Penyediaan Administrasi dan pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Kominfo | 1 Dok | Rp. 5.000.000. | DAU | | 1 Dok | Rp. 5.000.000. |
| | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD | Kominfo | 1 Dok | Rp. 11.000.000. | DAU | | 1 Dok | Rp. 11.000.000. |
| | | | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | Jumlah laporan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | Kominfo | 1 lap | Rp. 5.500.000. | DAU | | 1 lap | Rp. 5.500.000. |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan bulanan/triwulan/semester SKPD | Jumlah laporan bulanan/triwulan/semester SKPD | Kominfo | 1 lap | Rp. 5.000.000. | DAU | | 1 lap | Rp. 5.000.000. |
| | | | Administrasi kepegawaian perangkat daerah | | Kominfo | | Rp. 65.000.000. | DAU | | | Rp. 65.000.000. |
| | | | Pengadaan pakalan dinas beserta atribut kelengkapannya | Jumlah paket pakalan dinas beserta atribut kelengkapannya | Kominfo | 1 paket | Rp. 20.000.000. | DAU | | 1 paket | Rp. 20.000.000. |
| | | | Monitoring evaluasi dan penilaian kinerja Pegawai | Jumlah dokumen monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai | Kominfo | 1 dok | Rp. 20.000.000. | DAU | | 1 dok | Rp. 20.000.000. |
| | | | Sosialisasi dan peraturan perundang-undangan | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan | Kominfo | 35 org | Rp. 10.000.000. | DAU | | 35 org | Rp. 10.000.000. |
| | | | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Kominfo | 25 Org | Rp. 15.000.000. | DAU | | 25 org | Rp. 15.000.000. |
| | | | Administrasi Umum Perangkat daerah | | Kominfo | | Rp. 1.111.000.000. | DAU | | | Rp. 1.111.000.000. |
| | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Kominfo | 4 Paket | Rp. 41.000.000. | DAU | | 4 paket | Rp. 41.000.000. |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor | Kominfo | 4 paket | Rp. 150.000.000. | DAU | | 4 Paket | Rp. 150.000.000. |
| | | | Penyediaan peralatan Rumah tangga | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Kominfo | 4 Paket | Rp. 30.000.000. | DAU | | 4 paket | Rp. 30.000.000. |
| | | | Penyediaan Bahan logistik kantor | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Kominfo | 4 paket | Rp. 100.000.000. | DAU | | 4 paket | Rp. 100.000.000. |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------|---------|--------------------|-----|--|---------|--------------------|
| | | | | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kenderaan dinas jabatan | | Kominfo | 2 Unit | Rp. 50.000.000. | DAU | | 2 Unit | Rp. 50.000.000. |
| | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kenderaan dinas operasional atau lapangan | Jumlah kenderaan perorangan dinas atau kenderaan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajak perizinannya | Kominfo | 11 Unit | Rp. 150.000.000. | DAU | | 11 Unit | Rp. 150.000.000. |
| | | | | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah peralatan dan perlengkapan yang dipelihara | Kominfo | 50 Unit | Rp. 55.000.000. | DAU | | 50 Unit | Rp. 55.000.000. |
| | | | | Pemeliharaan aset tetap lainnya | Jumlah aset tetap yang dipelihara | Kominfo | 1 Unit | Rp. 150.000.000 | DAU | | 1 Unit | Rp. 150.000.000 |
| | | | | Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah gedung/kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Kominfo | 1 Unit | Rp. 100.000.000 | DAU | | 1 Unit | Rp. 100.000.000 |
| | | | | Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Kominfo | 2 Unit | Rp. 55.000.000 | DAU | | 2 Unit | Rp. 55.000.000 |
| | | | | URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | Kominfo | | | DAU | | | |
| | | | | Program pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik | Persentase Konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi | Kominfo | 100 % | Rp. 3.832.000.000. | DAU | | | Rp. 3.832.000.000. |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|---------|-------------|------------------|--------|-----|----------|------------------|
| | Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah | | Kominfo | 1 Dok | Rp. 100.000.000. | DAU | | 1 Dok | Rp. 100.000.000. |
| | Pengelolaan Government chief information officer (GCIO) | Jumlah dokumen pengelolaan egovernment chief information officer (GCIO) | Kominfo | 1 Dok | Rp. 100.000.000. | DAU | | 1 Dok | Rp. 100.000.000. |
| | Monitoring Evaluasi laporan pengembangan ekosistem SPBE | Jumlah dokumen monitoring evaluasi dan laporan penyelenggaraan SPBE | Kominfo | 1 Dok | Rp. 100.000.000. | DAU | | 1 Dok | Rp. 100.000.000. |
| | URUSAN STATISTIK | | Kominfo | | | DAU | | | |
| | Program penyelenggaraan Statistik Sektoral | | Kominfo | 18 Meladata | Rp. 163.015.000. | DAU | | | Rp. 163.015.000. |
| | Penyelenggaraan Statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota | | Kominfo | | Rp. 163.015.000. | DAU | | | Rp. 163.015.000. |
| | Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan analisis dan desiminasi data statistik sektoral | Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan analisis dan desiminasi data statistik sektoral | Kominfo | 1 Dok | Rp. 120.000.000. | DAU | | 1 Dok | Rp. 120.000.000. |
| | Mentangan melada statistik sektoral | Jumlah meladata statistik sektoral yang dihimpun | Kominfo | 1 Dok | Rp. 13.015.000. | DAU | | 1 Dok | Rp. 13.015.000. |
| | Peningkatan kapasitas kelenbagaan statistik sektoral | Jumlah perangkat daerah yang mendapat pelatihan statistik sektoral dari BPS | Kominfo | 33 Orang | Rp. 20.000.000. | DAU | | 33 Orang | Rp. 20.000.000. |
| | Penyelenggaraan otarisasi statistik sektoral di daerah | Jumlah data statistik sektoral yang dihimpun | Kominfo | 1 Dok | Rp. 10.000.000 | DAU | | 1 Dok | Rp. 10.000.000 |
| | URUSAN PERSANDIAN | | Kominfo | | | DAU | | | |
| | Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi | | Kominfo | | Rp. 505.000.000 | DAU | | | Rp. 505.000.000 |
| | Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota | | Kominfo | 1 Dok | Rp. 505.000.000. | DAU | | 1 Dok | Rp. 505.000.000. |
| | Penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten kota | Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jang komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota yang ditetapkan | Kominfo | 1 lap | Rp. 100.000.000. | DAU | | 1 Lap | Rp. 100.000.000. |
| | Pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota | Jumlah laporan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota | Kominfo | | Rp. 100.000.000. | DAU | | | Rp. 100.000.000. |
| | Pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik | Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten | Kominfo | | Rp. 300.000.000. | DAU | | | Rp. 300.000.000. |
| | Penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota | Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi | Kominfo | | | DAU | | | |
| | | | | | | Rp. 1. | DAU | | Rp. 5.000.000. |

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

| NO | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | PAGU INDIKATIF(Rp) |
|-----------|---|----------------------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 5.610.550.000 |
| A. | Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 20.000.000 |
| 1. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5.000.000 |
| 2. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5.000.000 |
| 3. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD | 5.000.000 |
| 4. | Evaluasi kinerja perangkat daerah | 5.000.000 |
| B. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3.475.550.000 |
| 1. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.449.550.000 |
| 2. | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 5.000.000 |
| 3. | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 11.000.000 |
| 4. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD | 5.000.000 |
| 5. | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan/bulanan/triwulan/semesteran SKPD | 5.000.000 |
| C. | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 85.000.000 |
| 1. | Pengadaan pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 20.000.000 |
| 2. | Monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai | 20.000.000 |
| 3. | Pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi | 20.000.000 |

| | | |
|-----------|---|--------------------|
| 4. | Sosialisasi peraturan perundang-undangan | 10.000.000 |
| 5. | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 10.000.000 |
| D. | Adminitrasi Umum Perangkat Daerah | 440.000.000 |
| 1. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 15.000.000 |
| 2. | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 40.000.000 |
| 3. | Penyediaan Peralatan rumah tangga | 20.000.000 |
| 4. | Penyediaan Bahan logistic kantor | 50.000.000 |
| 5. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 30.000.000 |
| 6. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 100.000.000 |
| 7. | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 10.000.000 |
| 8. | Penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 150.000.000 |
| 9. | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 25.000.000 |
| E. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 530.000.000 |
| 1. | Pengadaan Kendaraan Dinas atau kendaraan jabatan | 200.000.000 |
| 2. | Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan | 20.000.000 |
| 3. | Pengadaan mebel | 100.000.000 |
| 4. | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | 100.000.000 |
| 5. | Pengadaan Aset tetap lainnya | 100.000.000 |
| 6. | Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | 10.000.000 |
| F. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah | 410.000.000 |
| 1. | Penyediaan jasa surat menyurat | 5.000.000 |

| | | |
|------------|--|--------------------|
| 2. | Penyediaan jasa komunikasi Sumber daya air dan listrik | 80.000.000 |
| 3. | Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor | 300.000.000 |
| G. | Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 650.000.000 |
| 1. | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | 50.000.000 |
| 2. | Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | 100.000.000 |
| 3. | Pemeliharaan dan peralatan dan mesin lainnya | 100.000.000 |
| 4. | Pemeliharaan asset tetap lainnya | 150.000.000 |
| 5. | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya | 100.000.000 |
| 6. | Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya | 150.000.000 |
| II. | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | 957.693.661 |
| A. | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kota | 957.693.661 |
| 1. | Monitoring opini dan inspirasi publik | 107.000.000 |
| 2. | Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik | 250.000.000 |
| 3. | Pengelolaan Media komunikasi Publik | 325.000.000 |
| 4. | Pelayanan Informasi Publik | 225.000.000 |
| 5. | Layanan Hub Media | 5.000.000 |

| | | |
|------|--|----------------------------|
| 6. | Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan | 0 |
| 7. | Manajemen komunikasi krisis | 5.000.000 |
| 8. | Penyelenggara hubungan masyarakat media dan kemitraan komunitas | 5.000.000 |
| 9. | Penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana Pendukung informasi dan komunikasi publik Pemerintah daerah Kabupaten/Kota | 10.000.000 |
| III. | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | 4.869.944.682 |
| A. | Pengelolaan Nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah kabupaten/Kota | 44.000.000 |
| 1. | Pendaftaran nama domain Pemerintah Kabupaten Kota | 22.000.000 |
| 2. | Penatalaksanaan dan Pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah kabupaten/kota | 22.000.000 |
| B. | Pengelolaan E-Governmnet di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/kota | 4.825.944.682 |
| 1. | Pengelolaan Pusat data Pemerintah daerah | 2.800.000.000 |
| 2. | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi intra Pemerintah Daerah | 1.000.000.000 |
| 3. | Koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi | 1.000.000.000 |
| 4. | Koordinasi dan sinkronisasi Data dan informasi elektronik | 60.000.000 |
| 5. | Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintah berbasis elektronik | 220.000.000 |
| 6. | Penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah | 100.000.000 |
| 7. | Pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/kota cerdas dan kota cerdas dan kota cerdas | 100.000.000 100.000.000 |
| 8. | Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi | 100.000.000 |

| | | | |
|-----|---|--|-------------|
| | pemerintah daerah | | |
| 9. | Pengelolaan government chief information officer (GCIO) | | 100.000.000 |
| 10. | Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem SPBE | | 100.000.000 |
| IV. | Program Penyelenggaraan statistik sektoral | | 153.015.000 |
| A. | Penyelenggaraan Statistik sektoral dilingkup daerah kabupaten/kota | | 153.015.000 |
| 1. | Koordinasi dan sinkronisasi Pengumpulan, pengolahan, analisis dan desiminasi data statistik sektoral | | 100.000.000 |
| 2. | Membangun metadata statistik sektoral | | 13.015.000 |
| 3. | Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral | | 20.000.000 |
| 4. | Penyelenggaraan otorisasi Statitik sektoral di daerah | | 10.000.000 |
| V. | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | | 57.134.393 |
| A. | Penyelenggaraan Persandian Untuk pengamanan Informasi Pemerintah daerah/Kabupaten/Kota | | 52,134.393 |
| 1. | Penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota | | 42.134.393 |
| 2. | Pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota | | 5.000.000 |
| 3. | Pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik | | 0 |
| 4. | Penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota | | 5.000.000 |

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar Tahun 2025 ini memuat program dan kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun, dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Dinas Komunikasi dan Informatika kota Pematangsiantar menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) tahun 2025, sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program kegiatan tahun 2025 .Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya bisa dirasakan hingga ke level terbawah sehingga keberpihakan kepada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rancangan Awal Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar adalah program tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar yang sesuai dengan tupoksi dan sasaran program Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar. Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2025, dengan rencana kerja pelaksanaan anggaran dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota pematangsiantar, sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kota Pematangsiantar yang Mantap, Maju dan Jaya.

Pematangsiantar,
**KERALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA PEMATANGSIANTAR**

JOHANNES SIHOMBING,S.STP,M.Si
NIP.198103251999121001